



Jurnal Berkala Fakultas Hukum
UNIVERSITAS GADJAH MADA

MIMBAR HUKUM

Volume 25, Nomor 2, Juni 2013

ISSN 0852-100X

PENJAMINAN KREDIT USAHA KECIL MELALUI GIRALISASI DAN TRANSMISI JAMINAN
KEBENDAAN MENJADI TUNAI

Tarsisius Murwaji

KENDALA HAKIM DALAM MENCIPTAKAN KEPASTIAN HUKUM, KEADILAN, DAN
KEMANFAATAN DI PERADILAN PERDATA

Fence M. Wantu

PERAN PEMERINTAH DALAM PENANGGULANGAN PENCEMARAN AIR TANAH OLEH
BAKTERI *E. COLI* DI KOTA YOGYAKARTA

Fajar Winarni dan Dinarjati Eka Puspitasari

MEKANISME PERTANGGUNGJAWABAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
DAERAH (STUDI KASUS D.I. YOGYAKARTA)

Mailinda Eka Yuniza dan Adrianto Dwi Nugroho

IMPLEMENTASI PERATURAN PERIZINAN PEMBANGUNAN PERUMAHAN BAGI
PENGEMBANG TERKAIT ASPEK PERLINDUNGAN KONSUMEN DI DIY

Irna Nurhayati dan Dwi Haryati

MEKANISME *SMALL CLAIMS COURT* DALAM MEWUJUDKAN TERCAPAINYA PERADILAN
SEDERHANA, CEPAT, DAN BIAYA RINGAN

Efa Laela Fakhriah

MELINDUNGI KEANEKARAGAMAN HAYATI DALAM KERANGKA PROTOKOL NAGOYA

Yulia dan Zinatul Ashiqin Zainol

*JUSTICES' FREEDOM OF CONSTITUTIONAL INTERPRETATION METHOD IN THE INDONESIAN
CONSTITUTIONAL COURT*

Mardian Wibowo

*CLASS ACTION AGAINST THE NON-IMMEDIACY OF RATIFICATION OF THE 1990 MIGRANT
WORKERS CONVENTION*

Wisnu Aryo Dewanto

*REGULATION ON FOREIGN INVESTMENT RESTRICTIONS AND NOMINEE PRACTICES IN
INDONESIA*

David Kairupan

*THE MELTING POT OF LEGAL SYSTEMS IN INDONESIA (READING THE LEGAL POLITICS OF
INDONESIAN ISLAMIC LAW)*

Andi Nuzul

INDONESIA'S RESPONSIBILITY FOR CORAL REEF DAMAGE IN KEPULAUAN SERIBU

Natalia Yeti Puspita, Tisa Windayani and A. Aris Swantoro

POLICY, PROTECTION, POLICY HOLDER, AND LIFE INSURANCE EDUCATION TO THE SOCIETY

Hana Sri Juni Kartika

THE CRIME OF AGGRESSION: COMPLEXITIES IN DEFINITION AND ELEMENTS OF CRIME

Maskun

Mimbar Hukum	Vol. 25	No. 2	Hlm. 191 - 375	Yogyakarta Juni 2013	ISSN 0852-100X
-----------------	------------	----------	-------------------	-------------------------	-------------------

MIMBAR HUKUM

Jurnal Berkala Fakultas Hukum UGM

ISSN 0852-100X

Diterbitkan oleh Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada tiga kali setahun
pada bulan Februari, Juni dan Oktober
Volume 25, Nomor 2, Juni 2013

Ketua Dewan Penyunting

Khotibul Umam, S.H., LL.M.

Sekretaris

Rimawati, S.H., M.Hum.

Anggota Dewan Penyunting

Prof. Dr. Agustinus Supriyanto, S.H., M.Si.

Prof. Dr. Edward O.S. Hiariej, S.H., M.Hum.

Dr. Tata Wijayanta, S.H., M.Hum.

Penyunting Pelaksana

Heribertus Jaka Triyana, S.H., LL.M., M.A.

Andy Omara, S.H., M.Pub.&Int.Law.

Oce Madril, S.H., M.A.

Hartini, S.H., M.Si.

Herliana, S.H., M.Comm.Law.

Supriyadi, S.H., M.Hum.

Wahyu Yun Santoso, S.H., M.Hum., LL.M.

Rafael Edy Bosko, S.H., M.I.L.

Murti Pramuwardhani Dewi, S.H., M.Hum.

Dina W. Kariodimedjo, S.H., LL.M.

Tody Sasmitha Jiwa Utama, S.H., LL.M.

Adrianto Dwi Nugroho, S.H., Adv.LL.M.

Staf Administrasi

Dian Agung Wicaksono, S.H., LL.M.

Rizky Wirastomo, S.H.

Ananda Prima Yurista, S.H.

Shita Pina Saphira

MIMBAR HUKUM merupakan jurnal nasional terakreditasi berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor: 51/DIKTI/Kep/2010 tanggal 5 Juli 2010 tentang Hasil Akreditasi Jurnal Ilmiah. Penyunting menerima sumbangan tulisan berupa artikel hasil penelitian maupun artikel konseptual yang belum pernah diterbitkan dalam media lain. Ketentuan penulisan artikel dapat dilihat di halaman kulit dalam-belakang tentang "Ketentuan Penulisan Jurnal Mimbar Hukum".

MIMBAR HUKUM
Jurnal Berkala Fakultas Hukum UGM
ISSN 0852-100X

Volume 25, Nomor 2, Juni 2013
Halaman 191 - 375

DAFTAR ISI

PENJAMINAN KREDIT USAHA KECIL MELALUI GIRALISASI DAN TRANSMISI JAMINAN KEBENDAAN MENJADI TUNAI <i>Tarsisius Murwaji</i>	191 - 204
KENDALA HAKIM DALAM MENCIPTAKAN KEPASTIAN HUKUM, KEADILAN, DAN KEMANFAATAN DI PERADILAN PERDATA <i>Fence M. Wantu</i>	205 - 218
PERAN PEMERINTAH DALAM PENANGGULANGAN PENCEMARAN AIR TANAH OLEH BAKTERI <i>E. COLI</i> DI KOTA YOGYAKARTA <i>Fajar Winarni dan Dinarjati Eka Puspitasari</i>	219 - 230
MEKANISME PERTANGGUNGJAWABAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH (STUDI KASUS D.I. YOGYAKARTA) <i>Mailinda Eka Yuniza dan Adrianto Dwi Nugroho</i>	231 - 243
IMPLEMENTASI PERATURAN PERIZINAN PEMBANGUNAN PERUMAHAN BAGI PENGEMBANG TERKAIT ASPEK PERLINDUNGAN KONSUMEN DI DIY <i>Irna Nurhayati dan Dwi Haryati</i>	244 - 257
MEKANISME SMALL CLAIMS COURT DALAM MEWUJUDKAN TERCAPAINYA PERADILAN SEDERHANA, CEPAT, DAN BIAYA RINGAN <i>Efa Laela Fakhriah</i>	258 - 270
MELINDUNGI KEANEKARAGAMAN HAYATI DALAM KERANGKA PROTOKOL NAGOYA <i>Yulia dan Zinatul Ashiqin Zainol</i>	271 - 283
JUSTICES' FREEDOM OF CONSTITUTIONAL INTERPRETATION METHOD IN THE INDONESIAN CONSTITUTIONAL COURT <i>Mardian Wibowo</i>	284 - 299
CLASS ACTION AGAINST THE NON-IMMEDIACY OF RATIFICATION OF THE 1990 MIGRANT WORKERS CONVENTION <i>Wisnu Aryo Dewanto</i>	300 - 312
REGULATION ON FOREIGN INVESTMENT RESTRICTIONS AND NOMINEE PRACTICES IN INDONESIA <i>David Kairupan</i>	313 - 326
THE MELTING POT OF LEGAL SYSTEMS IN INDONESIA (READING THE LEGAL POLITICS OF INDONESIAN ISLAMIC LAW) <i>Andi Nuzul</i>	327 - 337
INDONESIA'S RESPONSIBILITY FOR CORAL REEF DAMAGE IN KEPULAUAN SERIBU <i>Natalia Yeti Puspita, Tisa Windayani and A. Aris Swantoro</i>	338 - 351
POLICY, PROTECTION, POLICY HOLDER, AND LIFE INSURANCE EDUCATION TO THE SOCIETY <i>Hana Sri Juni Kartika</i>	352 - 365
THE CRIME OF AGGRESSION: COMPLEXITIES IN DEFINITION AND ELEMENTS OF CRIME <i>Maskun</i>	366 - 375

CLASS ACTION AGAINST THE NON-IMMEDIACY OF RATIFICATION OF THE 1990 MIGRANT WORKERS CONVENTION

Wisnu Aryo Dewanto*

Department of International Law, Faculty of Law Universitas Surabaya, Surabaya
Jalan Ngagel Jaya Selatan 169, Surabaya, Jawa Timur 60284

Abstract

Ratification of treaties in Indonesia can be regarded as mere political acts, as ratification itself does not yet rule for its enforcement in Indonesia's jurisdiction. As stipulated in Article 11 of the 1945 Indonesian Constitution, these ratifications are still subject to consent from the Indonesian House of Representatives (DPR) as they are the appointed institution in Indonesia with treaty-making powers. The act of ratification by the Indonesian Government is regarded as a ratification only in the international sense, where such action would only make the treaty enter into force internationally, but not internally within Indonesia. This paper seeks to analyze the legal implications which signature and ratification of international treaties may hold in the Indonesian government. Such is done by studying the class action lawsuit for Indonesia being signatories the Convention on the Protection of the Rights of All Migrant Workers and Member of Their Families and its failure continue to further ratify the Convention.

Keywords: class action lawsuit, ratification, treaty.

Intisari

Ratifikasi perjanjian internasional merupakan tindakan politik yang memerlukan persetujuan dari Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) sebagai lembaga dengan *treaty-making power* sebagaimana yang diatur oleh Pasal 11 UUD 1945. Tindakan ratifikasi oleh Pemerintah Indonesia hanya bermakna sebagai ratification hanya dalam *the international sense*, yakni membuat perjanjian tersebut berlaku di level internasional, bukan berlaku di wilayah hukum Republik Indonesia. Artikel ini menganalisis proses and implikasi hukum diratifikasinya dan ditandatanganinya suatu perjanjian internasional oleh Pemerintah Indonesia dengan menelaah gugatan *class action* yang dilakukan terhadap Pemerintah Indonesia mengenai belum diratifikasinya Konvensi Buruh Migran.

Kata Kunci: gugatan *class action*, ratifikasi, perjanjian internasional.

Pokok Muatan

A. Introduction	301
B. Discussion.....	302
1. Meaning of Signature, Ratification and Accession to a Treaty	302
2. Treaties in the Indonesian Constitutional System	305
3. Legal Status of Treaties in Indonesia.....	306
4. Ratification of the 1990 Migrant Workers Convention does not Guarantee Protection of Indonesian Workers Abroad.....	307
C. Conclusion	310

* Correspondence address: wisnu@ubaya.ac.id